



KEBIJAKAN DAN PROGRAM PADA KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL

Disampaikan pada acara “Rapat Koordinasi Penetapan, Penataan dan
Pengelolaan KPPN Kotawaringin Barat”
Pangkalan Bun, 8 Mei 2018

Drs. Syahrul, MSi

Direktur Perencanaan
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan



3 RELEVANSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN



01

MENDORONG EKONOMI YANG MEMILIKI NILAI TAMBAH

Sumber keterbelakangan desa karena hanya memproduksi bahan baku. Kesejahteraan berasal dari sektor pengolahan (yang punya nilai tambah). Syarat yang harus dipenuhi mesti ada skala ekonomi. Skala ekonomi hanya bisa pada level kawasan perdesaan, bukan desa.

02



MEMPERKUAT POSISI TAWAR

Pelaku ekonomi desa hanya bisa sebagai "price taker" (penerima harga) sebab terpecah dalam individu/kelompok kecil. Bila mereka bergabung dalam kawasan (dan dikelola oleh Bumdes Bersama, misalnya), maka posisi tawar mereka akan kuat dan menjadi "price maker" (penentu harga).

03



MENCEGAH KANIBALISME ANTAR DESA

Jika desa dibiarkan berkompetisi satu dengan yang lain, maka mereka akan saling mematikan (bunuh) dan menguntungkan pelaku ekonomi besar (di kota). Desa-desa diajak berkolaborasi (cooperation), bukan berkompetisi (competition), agar menghasilkan kesejahteraan bersama.

4 FUNGSI KAWASAN PERDESAAN

01



DEEPENING (PENDALAMAN):

Pendalaman pembangunan mengharuskan adanya konsolidasi sumber daya agar terpenuhi skala ekonomi. Konsolidasi sumber daya harus dengan jalan menggabungkan kerjasama desa

02



BRIDGING (MENJEMBATANI):

relasi desa - kota sulit dibangun secara setara karena ketimpangan (sosial, ekonomi, politik, budaya, dll). Desa-desa mesti diperkuat dulu dengan jalan kolaborasi membentuk kawasan agar bisa berhubungan dengan kota secara seimbang. Fungsi kawasan di sini sebagai jembatan (mediasi).

03



COLLABORATING (MENERJASAMAKAN):

banyak pemangku kepentingan yg bisa diajak membangun desa (pemerintah, dunia usaha, universitas, LSM, Ormas, dunia internasional, dsb), tapi mesti dikelola dengan kapasitas yang memadai. Kawasan lebih sanggup mengorganisasikan pemangku kepentingan dalam poros kolaborasi ketimbang pada level desa

04



CONTROLLING (PENGENDALIAN):

bagi pemerintah atau pelaku tertentu pasti dibatasi kemampuan untuk pengendalian program. Rentang kendali pada level kawasan lebih mungkin diupayakan daripada desa yang jumlahnya amat banyak.

5 (K) DIMENSI PENYANGGA KAWASAN PERDESAAN

01



KONSENSUS (ANTARDESA):

desa yang bergabung harus merumuskan dan mengambil keputusan bersama atas konsep dan matriks kolaborasi pembangunan kawasan.

02



KETERPADUAN (HULU-HILIR):

kawasan yang berhasil bukan hanya harus fokus, tetapi juga bisa memadukan aktivitas dari hulu (produksi) sampai hilir (pemrosesan, distribusi, pemasaran, dll)

03



KELEMBAGAAN (ORGANISASI DAN ATURAN MAIN):

memapankan organisasi ekonomi (Bumdes Bersama atau yang lainnya) yang menopang pengembangan kawasan merupakan keniscayaan, termasuk menyusun segenap aturan main agar organisasi ekonomi itu mapan.

04



KOMUNITAS (ALAS GERAKAN):

pembangunan kawasan mesti merupakan gerakan warga dan pemangku kepentingan pada tingkat lokal, bukan semata hasrat pemerintah, pendamping, atau pelaku di luar kawasan.

05



KEBERLANJUTAN (PENGELOLAAN):

pembangunan kawasan merupakan proses yang tidak berhenti, namun pengembangan terus-menerus. Di sini dibutuhkan komitmen keberlanjutan dari seluruh pemangku kepentingan dengan menghidupkan seluruh potensi lokal.





RENCANA KEGIATAN DITJEN PKP TAHUN 2018



Penyusunan
Rencana Aksi PKP

10 Kawasan Perdesaan



Bantuan Usaha Produktif
Bagi Rumah tangga Miskin

8 Kecamatan



Pengembangan
BUMDes Bersama

80 Unit BUMDes Bersama



Pasar Kawasan Perdesaan

14 Unit



Embung/ Bangunan
Penampung Air Lainnya

30 Unit



Jalan Poros Antar Desa

19 Kawasan Perdesaan



Sarana
Prasarana Air Bersih

6 Kawasan Perdesaan



Pendamping Manajemen
Kawasan Perdesaan

70 Kawasan Perdesaan



Fasilitasi
Kerjasama Multi Pihak

33 Kabupaten



Sarana Pendukung
Perikanan Tangkap dan Budidaya

15 Kawasan Perdesaan



Pengembangan Potensi
Pariwisata Terpadu

14 Kawasan Perdesaan



Bantuan Sarpras Pasca
Panen Produksi Pertanian

24 Kawasan Perdesaan



Bantuan Sarpras
Pengembangan Peternakan

4 Kawasan Perdesaan

Catatan :

Sebagian Besar Lokasi Kegiatan Ditjen PKP
Tahun 2018 di lokasi KPPN



SEBARAN LOKASI INTERVENSI DAN JENIS BANTUAN DITJEN PKP TA 2018 DI LOKASI KPPN

No	Jenis Bantuan	Kabupaten		KPPN		Non KPPN	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan	14	100 %	9	64%	4	29%
2	Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya	15	100 %	10	67%	5	33%
3	Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan Potensi Peternakan di Kawasan Perdesaan	4	100 %	3	75%	1	25%
4	Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pascapanen Hasil Produksi Pertanian di Kawasan Perdesaan	24	100 %	12	50%	6	25%
5	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Rumah Tangga Miskin	8	100 %	7	88%	-	0%
6	Fasilitasi Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	72	100 %	59	82%	12	17%
7	Embung	30	100 %	12	40%	18	60%
9	Pembangunan Jalan Poros Antar Desa untuk Mendukung PRUKADES di Kawasan Perdesaan	19	100 %	15	79%	2	11%
10	Pembangunan Pembangkit Energi Listrik di Kawasan Perdesaan	7	100 %	7	100%	-	0%
11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kawasan Perdesaan	6	100 %	6	100%	-	0%
12	Pembangunan/Rehabilitasi atau Pengembangan Pasar Antar Desa/Kawasan Perdesaan	14	100 %	13	93%	1	7%
13	Pengembangan Prasarana dan Sarana BUMDes Bersama	79	100 %	51	65%	24	30%



FASILITASI DITJEN PKP TA 2018

KAWASAN DI KOTAWARINGIN BARAT



Pengembangan Prasarana dan
Sarana BUMDes Bersama



Fasilitasi Pendampingan
Pembangunan Kawasan Perdesaan



TERIMA KASIH



Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi